



PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA CIMAHI

**Muhammad Ar Roofi Saputra¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Noer Aptika
Fujilestari³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas peranan Dinas Sosial Kota Cimahi dalam pembinaan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih menjadi persoalan sosial meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peranan Dinas Sosial melalui dimensi normatif, ideal, dan faktual menurut Soraya (2017). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Dinas Sosial telah menjalankan tugas sesuai peraturan daerah. Namun secara ideal, pembinaan belum optimal, khususnya dalam keberlanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial. Secara faktual, hambatan utama meliputi minimnya anggaran, ketiadaan panti sosial permanen, lemahnya monitoring pasca pembinaan, dan kurangnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian merekomendasikan strategi pembinaan terintegrasi berbasis pemberdayaan, dengan penguatan sistem monitoring, pelatihan keterampilan, serta kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan strategi pembinaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pemberdayaan, dengan fokus pada pembentukan sistem monitoring, pelatihan keterampilan, serta sinergi antara Dinas Sosial, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menangani gepeng.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Peranan, Pembinaan, Gelandangan, Pengemis, Kota Cimahi.

Abstract

This study discusses the role of the Cimahi City Social Service in fostering homeless people and beggars (gepeng), which remain a social problem despite various enforcement efforts. The purpose of the study is to analyze the role of the Social Service through normative, ideal, and factual dimensions according to Soraya (2017). The method used is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation techniques. The results show that normatively, the Social Service has carried out duties in accordance with regional regulations. However, ideally, the coaching is not optimal, especially in sustainability, economic empowerment, and social integration. Factually, main obstacles include limited budget, absence of permanent social shelter, weak post-coaching monitoring, and lack of cross-sector collaboration. The study recommends integrated empowerment-based coaching strategies, with strengthened monitoring systems, skills training, and partnerships between government, business sector, and

community to create sustainable solutions. This study recommends more integrated empowerment-based coaching strategies, gepeng.

Keywords: Social Service, Role, Coaching, Homeless, Beggars, Cimahi City.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai aspek, termasuk kesejahteraan sosial. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan adalah permasalahan kemiskinan, yang mendorong munculnya gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai dampak dari kurangnya pendidikan, keterampilan, pekerjaan layak, dan penghasilan.

Keberadaan gepeng di Kota Cimahi menjadi perhatian serius, karena selain menimbulkan ketidaknyamanan publik, juga mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Meskipun pemerintah melalui Dinas Sosial telah melakukan penertiban dan pembinaan, namun efektivitas program ini masih diragukan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar gepeng yang dibina kembali ke jalan, menandakan lemahnya program pemberdayaan, kurangnya fasilitas penampungan, minimnya pelatihan keterampilan, dan lemahnya pengawasan pasca-pembinaan.

Permasalahan gelandangan dan pengemis (*gepeng*) merupakan salah satu isu sosial yang terus muncul di berbagai kota, termasuk di Kota Cimahi. Keberadaan gepeng di ruang publik seperti jalan raya, lampu merah, dan pusat perbelanjaan tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mencerminkan permasalahan sosial yang lebih kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan sosial.

Pemerintah melalui Dinas Sosial memiliki peranan penting dalam menangani persoalan ini, baik melalui pendekatan represif seperti razia maupun pendekatan persuasif berupa pembinaan. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan gepeng yang kembali ke jalan setelah dilakukan penertiban, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan fokus Dinas Sosial dalam proses pembinaan. Apakah pembinaan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, terstruktur, dan menyentuh akar

permasalahan, ataukah hanya sebatas formalitas dan kegiatan jangka pendek.

Dinas Sosial di Kota Cimahi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membina dan meningkatkan kualitas hidup gelandangan dan pengemis, serta mendorong reintegrasi gelandangan dan pengemis ke dalam masyarakat. Dalam hal penertiban gelandangan dan pengemis Pemerintah Kota Cimahi telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum menyebutkan, sebagai berikut:

Hidup dibawah garis kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak, kondisi pakaian yang tidak layak dan kotor karena mereka lebih memikirkan kebutuhan pangan, tidak memiliki kepercayaan diri dan disiplin diri sehingga melakukan tindakan pergelandangan dan pengemisan, tidak memiliki kesadaran dalam diri dan tanggung jawab sosial sehingga tersisih dari tata pergaulan dalam masyarakat luas, minim pendidikan dan tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat tinggal tidak layak huni, dan tidak memiliki identitas resmi.

Berikut adalah Tabel data penanganan gepeng oleh Dinas Sosial Kota Cimahi:

Tabel 1. 1 Data Penanganan Gepeng

Tahun	Jumlah Gepeng Tertangani	Persentase Kembali ke Jalan (%)	Persentase Berhasil Dibina (%)
2022	200	60%	40%
2023	230	65%	35%
2024	220	62%	30%

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi

Tabel menunjukkan tren peningkatan jumlah gepeng (gelandangan dan pengemis) yang tertangani oleh Dinas Sosial Kota Cimahi dari tahun 2022 ke 2023, naik dari 200 menjadi 230 orang. Namun pada tahun 2024 sempat berkurang walaupun persentase dalam pembinaan masih belum maksimal, hal yang menjadi perhatian adalah tingginya angka gepeng yang kembali ke jalan setelah dibina, meningkat dari 60% pada tahun 2022 menjadi 65% di tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 62%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial belum sepenuhnya efektif dari tahun 2022, 2023 dan 2024 hingga sekarang.

Fenomena masalah tersebut yang memperlihatkan belum efektifnya penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Cimahi. Dengan ini peneliti tertarik meneliti dengan teori peranan sebagai berikut:

1. Peranan Normatif, tidak adanya tanda- tanda kemajuan terhadap Program Penertiban Gelandangan dan Pengemis stiap waktunya Kedua Prosedur tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis masih kurang optimal.
2. Peranan Ideal, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi. Setelah gelandangan mendapatkan pembinaan, kurangnya tindak lanjut untuk memastikan mereka dapat menjaga kemandirian mereka dan tetap terintegrasi dalam masyarakat dapat mengurangi efektivitas program pembinaan.
3. Peranan Faktual, masih belum rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Penelitian ini didasari oleh teori peranan yang mencakup tiga dimensi: normatif (peran berdasarkan aturan), ideal (peran yang seharusnya dijalankan), dan faktual (peran yang nyata di lapangan). Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Cimahi dalam pembinaan gepeng belum berjalan efektif. Berbagai fenomena seperti masalah kebersihan, kesehatan, keamanan, stigma sosial, serta dampak terhadap pariwisata dan ekonomi lokal mempertegas perlunya pendekatan pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Sosial menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai penertib, tetapi juga sebagai pelaksana pemberdayaan sosial yang mampu mengatasi akar masalah gepeng di Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pegawai Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan

gepeng itu sendiri. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kota Cimahi

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teori Soraya (2017:11) yang menyatakan bahwa dalam Peranan Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis penting untuk memperhatikan 4 hal, yaitu:

Peranan Normatif

Dinas Sosial Kota Cimahi telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Wali Kota terkait penanganan gepeng. Penertiban dan pembinaan dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak terkait lainnya.

Peranan normatif merujuk pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Cimahi berdasarkan aturan hukum, peraturan daerah, dan kebijakan nasional yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan dan pembinaan gelandangan dan pengemis.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan pendataan dan penjangkauan terhadap individu yang termasuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk gepeng;
2. Menyediakan layanan rehabilitasi sosial;

3. Melakukan koordinasi antarinstansi, dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan;
4. Menyediakan fasilitas penampungan sementara serta melakukan pemulangan ke daerah asal.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan program pemberdayaan sosial dimana gelandangan dan pengemis ditawarkan program program pelatihan untuk bisa menjalankan hidup dengan selayaknya. Penegasan bahwa kebijakan yang dibuat tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) merupakan bentuk tanggung jawab normatif yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa, Penanganan GEPENG bukan sekadar penertiban, tetapi juga perlindungan hak dan martabat mereka sebagai manusia. Sikap ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan keadilan sosial.

Peranan Ideal

Idealnya, Dinas Sosial tidak hanya menertibkan gepeng, tetapi juga memberikan pembinaan berkelanjutan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan dukungan psikososial. Namun, dalam praktiknya, program seperti pelatihan keterampilan masih bersifat insidental dan tidak terprogram secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supijan Malik, A.K.S., MPSSp selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Cimahi menjelaskan terkait peranan ideal Dinas Sosial Kota Cimahi:

1. Visi dan Orientasi Jangka Panjang

Wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Cimahi memiliki visi jangka panjang yang berorientasi pada pendekatan pemberdayaan berkelanjutan, bukan sekadar penertiban. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat inklusif, di mana gepeng tidak dipandang sebagai beban sosial, melainkan sebagai kelompok yang dapat diberdayakan. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perubahan paradigma dari represif ke rehabilitatif.

2. Konsep Peranan Ideal

Peranan ideal yang dijelaskan narasumber mencakup lima komponen utama:

- Pemberdayaan ekonomi dan sosial (pelatihan kerja, bantuan usaha)

- Rehabilitasi komprehensif (layanan psikososial, tempat penampungan)
- Pendidikan vokasional sebagai bekal agar tidak kembali ke jalan
- Pendekatan humanis dan persuasif dalam penjangkauan
- Inklusi sosial dan reintegrasi keluarga

Hal ini mengindikasikan bahwa peranan ideal dinilai bukan hanya dari seberapa banyak gepeng ditertibkan, melainkan dari sejauh mana mereka dapat hidup mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat.

3. Pendekatan terhadap Gelandangan dan Pengemis

Dinas Sosial diharapkan memperlakukan gepeng sebagai subjek pembangunan sosial, bukan objek penertiban. Pendekatan yang diusulkan bersifat menyeluruh: pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pembinaan spiritual. Ini menunjukkan pendekatan multidimensional dalam pembinaan.

4. Harapan dan Strategi Peningkatan Peran

Harapan terhadap Dinas Sosial antara lain:

- Menambah tenaga profesional (psikolog, pekerja sosial)
- Memperkuat pendataan dan monitoring pasca-rehabilitasi
- Membangun tempat pelatihan dan penampungan permanen
- Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan organisasi sosial

Langkah strategis yang sedang diambil meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor, edukasi publik, dan pengembangan sistem data terpadu, yang menjadi syarat penting untuk meningkatkan efektivitas program.

Peranan Faktual

Secara faktual, banyak gepeng kembali ke jalan setelah dibina. Hal ini disebabkan oleh:

1. Tidak adanya panti sosial permanen di Kota Cimahi.
2. Minimnya program lanjutan pasca-pelatihan.
3. Keterbatasan anggaran operasional.
4. Kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat.

Hambatan Dalam Perana Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cimahi

Permasalahan Gelandangan dan Pengemis ini merupakan sebuah penyakit masyarakat yang sudah menjadi budaya yang kuat, hal ini timbul karena kurangnya lapangan pekerjaan dan menjadi pengemis merupakan jalan pintas bagi mereka untuk menghasilkan penghasilan dan memenuhi kehidupan hidup sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Cimahi, Dinas Sosial menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada rendahnya cakupan dan kualitas program pembinaan. Selain itu, belum tersedianya panti sosial permanen di Kota Cimahi menjadi kendala serius, karena tidak adanya fasilitas khusus untuk menampung dan membina gepeng secara berkelanjutan. Hambatan lainnya adalah minimnya program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian jangka panjang, sehingga banyak gepeng kembali ke jalan setelah menjalani pembinaan.

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap peserta pembinaan juga menghambat proses penilaian keberhasilan program dan perbaikan kebijakan. Di samping itu, kurangnya kolaborasi antara Dinas Sosial dengan pihak swasta, lembaga masyarakat, dan institusi pendidikan menyebabkan rendahnya inovasi dan keterlibatan multi pihak dalam penanganan masalah ini. Faktor internal dari gepeng sendiri juga menjadi tantangan, seperti rendahnya motivasi untuk berubah, pola pikir yang terbiasa dengan kehidupan jalanan, dan anggapan bahwa mengemis memberikan penghasilan lebih cepat. Tidak kalah penting, kurangnya data dan dokumentasi yang akurat mengenai jumlah, asal-usul, dan riwayat gepeng menyulitkan proses perencanaan serta tindak lanjut yang tepat sasaran. Seluruh hambatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang dilakukan masih belum optimal dan memerlukan perbaikan menyeluruh secara sistematis dan kolaboratif.

Upaya Dalam Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cimahi

Dinas Sosial Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terus berkembang di wilayahnya. Upaya ini mencakup langkah preventif, kuratif, hingga pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam kegiatan penertiban, dan dilanjutkan dengan pembinaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah pemberian pelatihan keterampilan kepada gepeng yang telah diamankan. Pelatihan ini mencakup pembuatan kerajinan tangan, pengolahan makanan sederhana, serta kegiatan kewirausahaan lainnya. Tujuannya adalah agar gepeng memiliki keterampilan dasar yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka.

Selain pelatihan, Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial, baik dalam bentuk bahan makanan, pakaian, maupun kebutuhan dasar lainnya, guna meringankan beban hidup mereka. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial juga melakukan pendataan dan pemulangan kepada gepeng yang berasal dari luar Kota Cimahi, dengan harapan mereka bisa kembali ke daerah asalnya dan mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Program pembinaan juga mencakup pembinaan mental dan sosial, yaitu memberikan motivasi, penyuluhan, serta pendekatan psikologis untuk mengubah pola pikir dan perilaku gepeng agar tidak kembali ke jalan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pembinaan yang tidak memadai, serta belum adanya rumah singgah atau panti sosial permanen.

Dinas Sosial Kota Cimahi juga mencoba membangun kerja sama dengan stakeholder lain seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), komunitas sosial, serta dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Namun, kolaborasi ini masih terbatas dan belum berjalan optimal secara berkelanjutan.

Secara umum, upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cimahi menunjukkan adanya niat baik dalam menangani permasalahan gepeng, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam

hal kesinambungan program, pemantauan pasca-pembinaan, dan pemberdayaan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Peranan Dinas Sosial Kota Cimahi dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis*, serta dengan menggunakan teori peranan yang membagi peranan ke dalam tiga bentuk, yaitu peranan normatif, peranan ideal, dan peranan faktual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Normatif

Dinas Sosial Kota Cimahi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan penjangkauan, pendataan, penertiban, serta pembinaan gelandangan dan pengemis yang berlandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Ketertiban Umum. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan.

2. Peranan Ideal

Harapan masyarakat terhadap Dinas Sosial cukup tinggi, khususnya agar pembinaan terhadap gepeng tidak hanya bersifat jangka pendek atau administratif, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial yang berkelanjutan. Masyarakat menginginkan peran yang lebih humanis dan solutif dari pemerintah, agar para gepeng bisa kembali menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif.

3. Peranan Faktual

Di lapangan, Dinas Sosial telah menjalankan berbagai program nyata seperti razia gepeng, penampungan sementara, pengiriman ke panti rehabilitasi, serta beberapa pelatihan dasar. Namun, efektivitas dari peranan ini masih terbatas karena adanya hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas panti di Kota Cimahi sendiri, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap eks-gepeng pascarehabilitasi. Akibatnya, masih banyak gepeng yang kembali turun ke jalan meskipun telah mengikuti proses pembinaan.

Secara umum, terdapat kesenjangan antara peranan ideal dan peranan faktual. Walaupun dari sisi normatif Dinas Sosial sudah berada pada jalur yang sesuai, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, terutama dalam hal dampak jangka panjang dan pemberdayaan sosial. Peranan normatif dan ideal Dinas Sosial dalam pembinaan gepeng mulai terealisasi secara faktual, khususnya dalam menanamkan nilai hidup tertib, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Namun, keterbatasan tindak lanjut pasca pembinaan masih menjadi kelemahan utama. Pembinaan semestinya tidak berhenti pada pelatihan dasar, tetapi perlu dilanjutkan dengan dukungan ekonomi secara nyata, seperti modal usaha, tempat usaha, dan pendampingan sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asmaya, Enung (2003). *Wajah Baru Dalam Pembinaan Karakter, Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisus.

Huda, Miftachul (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Miftachul Huda. (2009) *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Soekanto. (2012). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

Soetjipto Wirosardjono (1998). *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E).

Soraya, Ira. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis*, (Alauudin.Makasar)

Simanjuntak, Pasaribu (1990), *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito).

Race, J. R. (2010). *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. *Grasindo*.

Thoha, Miftah (2005). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Jurnal/Skripsi

Fadri, Zainal. (2019). *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*. *Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume10, Nomor1.

Qorina Salsabila, G. S. (2022). *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang*. *JAPS*, Volume 3, Nomor 3

Yusrizal & Romi Asmara. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)*.

Dokumen

1945, U. (1945). *Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat*.

Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 8 tahun 2009 tentang ketertiban umum

Internet

Retno, H. (2023, april). *Tim Portal Bandung Timur*. Retrieved from <https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-946579320/puluhan-pengemis-dan-gelandangan-di-kota-cimahi-diamankan>